

PELAKSANAAN REHABILITASI PASCA BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA

DOMINGGUS I HESELO

NPP. 30.1464

Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: Nalagata190@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Luh Putu Vera Astri Pujayanti, AP. MH

ABSTRACT

Problem Statement /Background (GAP): The author focuses on the problem of landslides which are disasters closest to nature are disasters due to environmental problems and support for land surface conditions that have a fairly high slope and lack of water catchment places make sub-districts and villages in Yahukimo Regency, Papua Province, get post-disaster assistance for rehabilitation and reconstruction. For this reason, the role of local governments through the Regional Disaster Management Agency is needed in helping to accelerate recovery and development that aims to restore activities that are conducive to the surrounding environment. **Purpose:** Purpose This study aims to know, describe and analyze the extent of the implementation of the Regional Disaster Management Agency in carrying out post-landslide disaster management in Yahukimo district. **Method:** Method This research was conducted with descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. **Result:** In this study, it was found that the Regional Disaster Management Agency as the Coordinator in the rehabilitation and reconstruction program in collaboration with SKPD, institutions and other parties. The Regional Disaster Management Agency as a coordinator in the implementation of rehabilitation and reconstruction, but the technical implementation is more carried out by the relevant SKPD so that it has an impact on the role carried out not in accordance with existing guidelines. **Conclusion:** The author concludes that the role of BPBD Yahukimo Regency in post-landslide rehabilitation efforts has been going well but not optimally. In addition, the program that BPBD has implemented to increase the capacity and quality of BPBD employees is by conducting training for all employees.

Keywords : Implementation, Rehabilitation, Landslide



ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Penulis berfokus pada permasalahan Tanah Longsor yang menjadi bencana yang paling berdekatan dengan alam merupakan bencana akibat adanya persoalan lingkungan serta dukungan kondisi permukaan tanah yang memiliki kemiringan cukup tinggi serta kurangnya tempat resapan air membuat Kecamatan dan desa di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua mendapatkan bantuan pasca bencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk itu dibutuhkan peran dari pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam membantu mempercepat pemulihan dan pembangunan yang bertujuan untuk mengembalikan aktivitas yang kondusif pada lingkungan sekitar. **Tujuan:** Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis sejauh apa pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan penanganan pasca bencana tanah longsor di kabupaten Yahukimo. **Metode:** Metode Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Pada Penelitian ini ditemukan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Koordinator dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi yang bekerja sama dengan SKPD, instansi serta pihak-pihak lain. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi namun pada pelaksanaan teknisnya lebih dilakukan oleh SKPD terkait Sehingga berdampak pada peran yang dijalankan tidak sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ada. **Kesimpulan:** Penulis menyimpulkan bahwa peran dari BPBD Kabupaten Yahukimo dalam upaya rehabilitasi pasca bencana tanah longsor telah berjalan dengan baik namun belum optimal. Selain itu, program yang sudah BPBD terapkan untuk menambah kapasitas dan kualitas Pegawai BPBD yaitu dengan cara melakukan pelatihan kepada keseluruhan pegawai.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Rehabilitasi , Tanah longsor



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melihat yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, tentang Sistem Penanggulangan Bencana bahwa salah satu tahapan dalam penanggulangan pasca bencana yaitu tahap pemulihan. Tahapan ini muncul setelah tanggap darurat, dimana pada tahapan ini yang menjadi penekanan adalah pada upaya-upaya yang sekiranya bisa dilakukan dalam mengembalikan situasi dan kondisi masyarakat beserta lingkungannya. Caranya yaitu dengan difungsikan kembali kelembagaan beserta sarana prasarana dengan terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Terlepas daripada yang telah disebutkan diatas, mengembalikan keadaan dan kondisi seperti semula saja tidak cukup, sehingga perlu adanya persiapan untuk menghadapi bencana yang akan datang.

Mendukung tahapan ini, terdapat fase rehabilitasi dengan tujuan utama yaitu untuk perbaikan dan juga pemulihan dari segi aspek pelayanan dan masyarakat untuk wilayah yang terdampak bencana. Upaya ini untuk memenuhi sasaran ataupun target utama dalam mencapai kembali normalnya kondisi atau dapat kembali berjalan dengan wajar segala 2 aspek pemerintahan, beserta kehidupan sosial keseharian masyarakat bagi yang berada pada wilayah terdampak bencana. Banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya mengelola bencana dengan efisien karena terjadinya suatu bencana tidak dapat diprediksi. Dalam hal ini risiko yang berdampak pada masyarakat yaitu 2 kekurangan informasi mengenai tahapan penyuluhan dan pencegahan bencana. Menurut Rinaldi (2009), kesiapsiagaan bencana masyarakat Indonesia masih sangat minim, hal ini dibuktikan dari banyaknya korban jiwa serta harta benda dari setiap terjadinya bencana.

Banyak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, yaitu hilangnya korban jiwa, kerusakan pada lingkungan, kerugian akan harta benda, dan dampak psikologis. Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan akan terjadinya bencana yang menyebabkan timbulnya korban yang begitu banyak. Penyebab lain yang menimbulkan banyak korban yaitu karena ketidaksiapan masyarakat saat terjadinya bencana sehingga munculnya kepanikan.

Kabupaten Yahukimo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Secara Topografis Kabupaten Yahukimo sangat bervariasi mulai dari daerah dataran rendah sampai bergunung-gunung berlembah dengan lereng-lereng yang curam yang umumnya terletak di daerah dekat aliran sungai.

Kabupaten Yahukimo dilintasi oleh Sungai sepanjang 670 km dan memiliki kedalaman terdalam 33m itu memiliki debit air sebesar 5.500 m³/Vdetik. Besarnya debit itu disebabkan curah hujan di daerah aliran sungai (DAS) Braza sangat tinggi, mencapai 5.600 mm/ tahun. Distrik Kurima adalah salah satu daerah yang sangat berpotensi mengalami tanah longsor, lebih parahnya lagi jika sedang memasuki musim penghujan, hal ini disebabkan karena lokasinya yang berbukit-bukit dengan struktur tanah yang rawan bergerak apabila air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng ditambah lagi banyak sungai kecil yang dapat meluap airnya jika terjadi hujan.

Distrik Kurima mempunyai Karakteristik lahan dengan topografi berbukit dan bergunung-gunung dengan ketinggian tempat bervariasi dari lereng yang landai sampai dengan sangat terjal. Kestabilan lereng yang tanahnya berlempung sangat dipengaruhi oleh banyaknya air yang meresap kedalam lereng. Berdasarkan kondisi wilayah di Distrik Kurima, sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Yahukimo lebih menyikapi masalah dengan positif dan signifikan terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kebutuhan mendasar seperti informasi dan pengetahuan yang berguna untuk mengembangkan sikap baru yang lebih mendasar, proaktif, menyeluruh dan perilaku positif dalam menyikapi bencana tersebut.

Penanganan pasca bencana yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan capaian sasaran secara efektif, kapasitas lokal yang mengalami perkembangan, dan peningkatan partisipasi dalam mencegah dampak berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya penanganan pasca bencana masih mengalami beberapa hambatan. Salah satu hambatan dalam penanganan proses

penanggulangan pasca bencana ialah ketika kerja sama yang terjalin masih belum terjalin dengan baik, sebab kerja sama yang baik sangat penting dilakukan ketika peristiwa bencana terjadi. Hubungan, komunikasi, dan interaksi dari berbagai pihak terkait di perlukan dalam proses penanganan pasca bencana. Rendahnya hubungan satu dengan yang lain dapat terlihat dari prosedur-prosedur kelembagaan yang harus sudah dilakukan dengan benar namun mendapatkan respon yang belum cepat dari pihak yang lebih tinggi, seperti perijinan yang lama dan berbelit-belit sehingga berpotensi gagal nya pencapaian dalam penanggulangan bencana di lapangan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penanganan pasca bencana yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan capaian sasaran secara efektif, kapasitas lokal yang mengalami perkembangan, dan peningkatan partisipasi dalam mencegah dampak berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya penanganan pasca bencana masih mengalami beberapa hambatan. Salah satu hambatan dalam penanganan proses penanggulangan pasca bencana ialah ketika kerja sama yang terjalin masih belum terjalin dengan baik, sebab kerja sama yang baik sangat penting dilakukan ketika peristiwa bencana terjadi. Hubungan, komunikasi, dan interaksi dari berbagai pihak terkait di perlukan dalam proses penanganan pasca bencana. Rendahnya hubungan satu dengan yang lain dapat terlihat dari prosedur-prosedur kelembagaan yang harus sudah dilakukan dengan benar namun mendapatkan respon yang belum cepat dari pihak yang lebih tinggi, seperti perijinan yang lama dan berbelit-belit sehingga berpotensi gagal nya pencapaian dalam penanggulangan bencana di lapangan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keselarasan bidang keilmuan yang dikaji oleh peneliti. Penelitian pertama yaitu penelitian yang berjudul *Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten*. Penelitian ini ditulis oleh Livia Putri Syahrillia (2021). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teori yang menjadi acuan adalah teori koordinasi menurut Arsyad (2000), Moekjiat (1989), dan Hasibuan (2011). Beberapa aspek yang diteliti oleh penelitian pertama ini adalah aspek perencanaan, aspek pelaksanaan dan aspek upaya. Penelitian kedua yang menginspirasi penelitian ini adalah penelitian berjudul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*. Penelitian kedua ini ditulis oleh Sri Heryati (2020). pada penelitian ini beberapa aspek yang menjadi fokus penelitian adalah aspek legalisasi, aspek kelembagaan, aspek perencanaan, aspek pendanaan dan aspek pengembangan kapasitas. Penelitian ketiga yang menginspirasi peneliti dalam menulis karya ini adalah penelitian berjudul *Kendala Dalam Menanggulangi Bencana Tanah Longsor Berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Agam*. Penelitian ini ditulis oleh Suci Nurhidayati dan Zikri Alhadi (2021). Penelitian ini menggunakan teori kendala yang memiliki dimensi kendala internal dan eksternal.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian pertama penelitian sebelumnya membahas tentang penanganan bencana tanah longsor yang ada di Kota Tangerang Provinsi Banten, sedangkan peneliti membahas rehabilitasi bencana tanah longsor yang ada di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. Pada penelitian kedua peneliti terdahulu membahas peran pemerintah daerah secara keseluruhan dengan melihat aspek legalisasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan dan pengembangan kapasitas. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana tanah longsor dengan melihat aspek proyek dan program. Pada penelitian ketiga peneliti terdahulu hanya berfokus membahas kendala penanganan bencana tanah longsor di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan pada penelitian ini peneliti secara keseluruhan membahas rangkaian tahap rehabilitasi pasca bencana tanah longsor di Kabupaten Yahukimo.

1.5 Tujuan

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis sejauh apa pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan penanganan pasca bencana tanah longsor di kabupaten Yahukimo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana tujuannya adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi sedalam-dalamnya dengan pengumpulan data dari berbagai sumber sehingga menunjukkan secara detail data yang di teliti. Menurut Sugiyono (2011:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilandasi filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,(sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan 5 orang yang terdiri dari Kepala BPBD Kabupaten Yahukimo, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta 3 orang masyarakat korban bencana tanah longsor. Adapun analisis penelitian ini menggunakan 3 tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Pelaksanaan Rehabilitasi Pasca Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua dengan menggunakan teori Tjokroadmudjoyo (2014:7). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Program Rehabilitasi Pasca Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.

Anggaran. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung oleh anggaran. Anggaran sangatlah penting dalam mendukung seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam melaksanakan peranannya, suatu instansi atau badan memerlukan dana atau anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Alokasi anggaran tersebut mengacu dalam perencanaan program yang telah dibentuk oleh instansi atau badan yang bersangkutan. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Yahukimo harus dapat merencanakan program sesuai dengan visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi organisasi, sehingga perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Sarana dan Prasarana. Sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sarana dan prasarana sangat penting bagi suatu instansi. Tanpa adanya sarana dan prasarana, pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo tentunya akan kesulitan. Maka dari itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan tercukupi sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses penanggulangan bencana. Dari observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo telah memperoleh fasilitas-fasilitas penunjang pelaksanaan program kerja. BPBD Kabupaten Yahukimo memiliki 25 sarana dan prasarana dengan rata-rata dalam kondisi baik, namun masih ada saja kekurangan dalam hal jumlah dari fasilitas tersebut.

Jumlah dan Kualitas Pegawai. Sumber daya manusia ataupun pegawai sangat penting dalam suatu organisasi, karena dengan adanya sumber daya manusia maupun pegawai suatu instansi dapat meraih program yang sudah ditetapkan pada instansi tersebut. Berdasarkan data Kepegawaian Sub Bagian Umum BPBD Kabupaten Yahukimo per Januari Tahun 2022 jumlah pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo adalah 22 orang dengan berstatus PNS, dengan golongan terendah yang dimiliki adalah Golongan/Ruang II/b (Pengatur Muda Tingkat I) dan yang tertinggi adalah Golongan/Ruang IV/c (Pembina Utama

Muda). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo memiliki 39 orang pegawai dengan status pegawai kontrak. Kualitas pegawai dari BPBD Kabupaten Yahukimo dapat dilihat dari status pendidikannya. Status pendidikan formal pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo. Rata-rata sudah menyelesaikan pendidikan S1 sebanyak 10 pegawai dan S2 sebanyak 8 pegawai, dan yang memiliki pendidikan paling rendah adalah setingkat SMA yaitu 3 orang pegawai. Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Yahukimo sebagai instansi dari pemerintah mempunyai kualitas pegawai yang sudah memenuhi standar namun masih terdapat kekurangan dalam jumlah pegawai. Hal ini harus diperhatikan karena faktor kuantitas pegawai juga mempengaruhi kemajuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri.

3.2. Proyek Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo

Dalam mewujudkan program yang telah dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo perlu adanya realisasi secara nyata. Realisasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk pembentukan Desa Tangguh Bencana. Desa tangguh bencana (Destana) merupakan sebuah desa yang telah memiliki kemampuan dan pemahaman dalam menanggulangi risiko bencana yang ada di wilayahnya melalui pengurangan kerentanan dan meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada Penelitian ini peneliti membahas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor yang ada pada Kabupaten Yahukimo dengan menggunakan teori Pelaksanaan Bintoro Tjokroatmudjoyo (2017:7). Pada Penelitian ini ditemukan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Koordinator dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi yang bekerja sama dengan SKPD, instansi serta pihak-pihak lain. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi namun pada pelaksanaan teknisnya lebih dilakukan oleh SKPD terkait Sehingga berdampak pada peran yang dijalankan tidak sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ada. Hambatan pada penelitian ini yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo kekurangan anggaran dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, Kurangnya Sumber Daya Aparatur, kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya menanggulangi bencana.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran dari BPBD Kabupaten Yahukimo dalam upaya rehabilitasi pasca bencana tanah longsor telah berjalan dengan baik namun belum optimal. Selain itu, program yang sudah BPBD terapkan untuk menambah kapasitas dan kualitas Pegawai BPBD yaitu dengan cara melakukan pelatihan kepada keseluruhan pegawai. Terdapat beberapa faktor yang menghambat, yaitu kurangnya sumber daya aparatur, terbatasnya anggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana. Upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo untuk mengatasi faktor penghambat yaitu dengan cara peningkatan sumber daya aparatur, melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain, dan melakukan pembentukan kelurahan tangguh bencana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni terbatasnya waktu melaksanakan penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan kajian serupa di Kabupaten Yahukimo mengingat akan ancaman bencana tanah longsor yang senantiasa mengintai masyarakat. Oleh karena itu peneliti mengharapkan agar penelitian serupa dilanjutkan guna memberikan solusi terbaik bagi Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan secara khusus BPBD Kabupaten Yahukimo.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo dan Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Bintoro Tjokroadmudjoyo (2017). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam*. Lampung: Universitas Jakarta
Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012) 2013. *Metode Penelitian Pendidikan – Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabet.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

C. JURNAL DAN SKRIPSI

Heryati, Sri, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana no 2*, agustus 2020
Livia Putri Syahrillia 2020, *Pelaksanaan penanganan pasca bencana tanah longsor di kecamatan siding kelinci kabupaten rejang lebong provinsi Bengkulu*
Nurhidayati, S. & Alhadi, Z. (2021). *Efektivitas Peran BPBD Dalam Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pasca Bencana Banjir di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 193-199.
Nehru, A. (2017).
Rinaldi. 2009. *Kesiapan Menghadapi Bencana Pada Masyarakat Indonesia*. Jurnal Penelitian Psikologi. 14 (1). hlm: 44-52

